

dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

Sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang bersifat universal, dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka perlu didorong penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan. Pada Undang - Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Terdapat 5 kampung KB yang berada di wilayah Kecamatan Cijeungjing, salah satunya adalah Kampung KB MAWAR yang merupakan Kampung KB yang cukup aktif dalam menjalankan program kampung KB. Kampung KB mawar terdapat di Desa Kertabumi yang memiliki jumlah jiwa 2.649 penduduk dengan jumlah kepala keluarga 935 keluarga.

Tujuan nasional yang ingin dicapai dari Kampung KB adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kampung KB adalah wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan pembangunan nawacita ke 3, 5, dan 8 yaitu: (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan (8) Melakukan revolusi karakter

bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Kriteria pemilihan Kampung KB yaitu utamanya pencapaian KB rendah dan pra keluarga sejahtera; wilayah miskin, terpencil, kumuh dan perbatasan; juga lintas sektor pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Kegiatan lintas sektor seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan kartu tanda penduduk, penyediaan buku bacaan, posyandu, juga pendidikan anak usia dini dan lain-lain. Kegiatan dari sisi ketahanan keluarga yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R), juga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Pembentukan Kampung KB menjadi inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara utuh di lini lapangan yang dapat bersinergi dengan mitra kerja, *stakeholders*, instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dimana Kampung KB tersebut dibentuk. Kampung KB upaya cegah ledakan penduduk dengan realisasi.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana strategis BKKBN tahun 2015-2019 sejalan dengan renstra dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten

Ciamis, dalam bidang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, memiliki 6 sasaran strategi yaitu:

1. Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk,
2. Menurunkan *total fertility rate (TFR)*,
3. Meningkatkan *contraceptive prevalence rate (CPR)*,
4. Menurunnya *unmet need*,
5. Menurunnya *age specific fertility (ASFR)*,
6. Menurunnya presentase kehamilan

Berdasarkan hasil observasi peneliti kelapangan berikut adalah tantangan dan masalah yang peneliti temukan pada Kampung KB di kampung mawar Desa kertabumi kecamatan Cijeungjing kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan kampung KB semakin kompleks seperti masih adanya pernikahan dini, rendahnya peserta KB pada pria, serta masih adanya *trafficking* dan pelecehan seksual bahkan KDRT.

Selain tantangan tersebut dalam implementasi kebijakan program kampung KB ini juga terdapat permasalahan yang dihadapi seperti kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan program kampung KB, perspektif masyarakat yang masih kurang terhadap kebijakan kampung KB, lalu pengawasan dari implementasi kebijakan program kampung KB yang hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu pendanaan dari implementasi kebijakan kampung KB kurang dan juga kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana,

dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 22 Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan:

- a. Pembinaan keluarga balita dan anak;
- b. Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan pusat informasi dan konseling ketahanan reproduksi remaja/mahasiswa;
- c. Pembinaan ketahanan keluarga lansia;
- d. Pembinaan ekonomi keluarga.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat wajib dalam pembentukan Kampung KB yang tertulis sesuai petunjuk teknis Kampung KB oleh BKKBN, yang berarti partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R sangat berperan penting dalam pelaksanaan Kampung KB.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Kampung MAWAR Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat”**

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, agar permasalahan yang tercermin dalam latar belakang penelitian lebih terlihat jelas dalam fokus penelitian, sehingga dapat memberikan kejelasan dan mencerminkan pokok permasalahan yang diteliti, maka fokus penelitian yang akan dikaji yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kampung KB yang berada di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing ini,

sehingga peneliti dapat menganalisis permasalahan mengenai implementasi kebijakan dari program salah satu kampung KB di kecamatan cijeungjing. Pada penelitian ini implementasi meliputi : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian diperlukan untuk lebih mempersempit masalah yang akan diteliti. Dari uraian-uraian yang ada dalam keterangan latar belakang, maka dari itu peneliti membatasi penelitiannya pada Implementasi Poktan (Kelompok Kegiatan) Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung KB MAWAR yang berada di Desa Kertabumi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan pemerintah Desa dalam Implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program kampung KB di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis provinsi Jawa Barat?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendapatkan gambaran yang jelas dan menganalisis mengenai keterlibatan pemerintah Desa dalam Implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program kampung KB dan juga solusinya di Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis provinsi Jawa Barat.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini peneliti menjelaskan manfaat penelitian secara teoritik dan praktik.

1.6.1. Manfaat teoritik

1. Mengembangkan teori Kebijakan Publik yang telah diperoleh selama perkuliahan
2. Dapat dijadikan bahan pemahaman untuk penelitian selajutnya

1.6.2. Manfaat praktik

1. Hasil penelitian ini menjadi bahan masuka khusus nya kepada pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah serta mengambil langkah suatu kebijakan untuk menangani lebih lanju mengenai implementasi kebijakan program kampung KB.
2. Hasil penelitian ini memberi manfaat terhadap masyarakat sebagai pembelajaran dalam implementasi kebijakan program Kampung KB.
3. Menjadi bahan pembelajaran bagi penulis ataupun pembaca agar lebih bijaksana dalam memngambil langkah yang akan diambil atas suatu kebijakan demi kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia penelitian dan akademik untuk merujuk pada tinjauan atau penelaahan terhadap berbagai pustaka, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik atau masalah yang ingin diteliti.

Kegiatan kajian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkini dan terpercaya tentang topik yang akan diteliti. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memahami status terkini pengetahuan tentang topik tersebut, melihat perkembangan yang telah terjadi, dan mengidentifikasi kesenjangan atau celah pengetahuan yang dapat diisi melalui penelitian baru.

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti bertujuan sebagai acuan dasar dalam penyusunan penelitian dan bahan perbandingan. Tujuannya agar dapat mengetahui hasil penelitian yang sejenis oleh peneliti terdahulu untuk menjadi gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu guna mendukung penelitian peneliti. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang peneliti gunakan:

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pendekatan	Metode	Teknik analisis
1	Lia Muliawaty, Maharto (2019)	Strategi Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Cirebon	Kualitatif	Deskriptif analisis	Dalam penelitian ini cenderung ke analisis studi kasus , peneliti menyelidiki secara cermat dengan mengadakan wawancara dan observasi langsung.
2	Atik Rohaeni, Endah Christianingsih (2022)	Implementasi Kebijakan Program Kampung Kb Dikecamatan Anjarsari Kabupaten Bandung	Kualitatif	Deskriptif kualitatif	Dalam penelitian ini untuk teknik penelitian adalah wawancara terhadap narasumber yang mendalam
3	Rifian Handi, Susjianto, Dan Zaili Rusli (2020)	Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana	Kualitatif	Deskriptif kualitatif	Teknik analisis pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara dan observasi
4	Prasethyo Darmawan Sumba, Fenti Prihatini Dance Tui, Rustam Tohop (2021)	Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana	Kualitatif	Deskriptif kualitatif	teknik yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
5	Normajatun, Sitna Hajar Malawat, Fika Fibriyanita (2018)	Implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana - Kampung baiman (KKB-KB) di kota banjarmasin	Kualitatif	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini mengumpulkan data dan menganalisa data, kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

1. Lia Muliawaty, Maharto (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Lia Muliawaty dan Maharto (2019) dengan judul **“Strategi Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Cirebon”** penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan program Kampung KB yang berstudi kasus Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan hasil Implementasi kebijakan tentang program kampung keluarga berencana menuju keluarga sejahtera di Kabupaten Cirebon belum terwujud, disebabkan oleh faktor *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi) yang belum maksimal. Strategi yang efektif untuk dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan tentang program kampung keluarga berencana menuju terwujudnya keluarga sejahtera di Kabupaten Cirebon adalah cenderung ke strategi diversifikasi atau strategi ST, dimana dalam strategi ini menggunakan atau memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang dihadapi, dengan inovasi menambah program lain supaya tidak jenuh.

Dari penelitian ini ada persamaan yaitu seperti metode penelitian dan pendekatan dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaan terletak di teori yang di bawakan pada penelitiannya yaitu teori Grindle sedangkan pada penelitian ini yaitu teori George Edward III.

2. Atik Rohaeni, Endah Christianingsih (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Atik Rohaeni, Endah Christianingsih (2022) dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Kampung Kb Di Kecamatan Anjarsari Kabupaten Bandung”** penelitian ini mengkaji tentang implementasi

kebijakan program kampung KB di Kecamatan Anjarsari Kabupaten Bandung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, ukuran ideal pencapaian standar sasaran program belum tercapai secara optimal, sumber daya manusia cukup memadai, sedangkan sumberdaya finansial serta sumber daya fasilitas masih relatif kurang, komunikasi dengan transmisi/penyaluran informasi sudah berjalan dengan baik, jelas dan konsisten, struktur organisasi dapat bekerja dengan baik, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap dan jelas, namun dalam sisi kerja sama masih harus ditingkatkan, pengaruh program terhadap kondisi ekonomi dan sosial, terhadap opini publik cukup positif, dukungan elit politik yang baik, respon, pemahaman dan sikap yang serius dari agen pelaksana yang sudah baik namun perlu ditingka.

Dari peneliti tersebut terdapat beberapa perbedaan yaitu di teori yang diambil oleh peneliti yaitu Glindle, sedangkan peneliti mengembangkan dengan teori George Edward III.

3. Rifian Handi, Susjianto, Dan Zaili Rusli (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Rifian Handi, Susjianto, Dan Zaili Rusli (2020) dengan judul **“Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana”** Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah Implementasi program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar telah dideskripsikan dengan menggunakan teori model Implementasi yang di kemukakan oleh George Edward III yang mana terdapat empat indikator didalamnya, yaitu antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi,

dan struktur birokrasi yang dijabaran dari Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan semua hasil dari penelitian yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua indikator dari sudah berjalan dengan sangat baik terkait pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, hanya saja masih terdapat masalah pada indikator disposisi yaitu sikap yang mana diberikan oleh para kader Kampung Keluarga Berencana yang dinilai kurang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, hal ini bila dibiarkan terus menerus maka nantinya bisa menjadi penghambat keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana.

Dari peneliti oleh Rifian Handi, Susjianto, Dan Zaili Rusli (2020) tersebut terdapat persamaan dengan yang dilakukan oleh peneliti dari sisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan juga teori yang diambil oleh peneliti

4. Prasethyo Darmawan Sumba, Fenti Prihatini Dance Tui, Rustam Tohop (2021)

Penelitian ini dilakukan oleh Prasethyo Darmawan Sumba, Fenti Prihatini Dance Tui, Rustam Tohop (2021) dengan **judul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana”** Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) di Kecamatan Kota Barat pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala seperti terbatasnya sekretariat dan ruang pelayanan, kualitas

SDM penyuluh perlu di tingkatkan dan prasarana perkantoran yang masih kurang seperti komputer dan internet. Dilihat dari faktor-faktor yang menentukan implemetasi kebijakan program kampung keluarga berencana (KB) pada umumnya belum terpenuhi sesuai dengan tujuan system program kampung KB itu sendiri yakni pada system di Kecamatan Kota Barat SOP dan alur pelayanannya tidak tertera di papan informasi jadi masyarakat masih kebingungan saat mengurus berkas pelayanan yang mereka ajukan.

Dari peneliti tersebut terdapat persamaan dengan yang dilakukan oleh peneliti dari sisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan juga teori yang diambil oleh peneliti.

5. Normajatun, Sitna Hajar Malawat, Fika Fibriyanita (2018)

Penelitian ini dilakukan oleh Normajatun, Sitna Hajar Malawat, Fika Fibriyanita (2018) dengan judul **“Implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana - Kampung baiman (KKB-KB) di kota banjarmasin”** berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Program Kampung KB Kampung Baiman di Kota Banjarmasin, khususnya pada Kelurahan Pemurus Luar, Kelurahan Sungai Jingah, Kelurahan Sungai Andai, Kelurahan Kampung Gadang, Kelurahan Pelambuan dan Kelurahan Tanjung Pagar sudah berjalan dengan baik, bisa dilihat dari proses dan diilihat dari hasil serta tercapainya tujuan yang sudah berjalan optimal.

Dari peneliti tersebut terdapat persamaan dengan yang dilakukan oleh peneliti dari sisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan juga teori yang diambil oleh peneliti.

2.1.1. Grand Theory

2.1.1.1. Kajian Administrasi

Ketika Administrasi ada, selalu ada pola pikir yang dijadikan pedoman untuk melakukan berbagai aktivitas manusia yang sengaja dilakukan agar pelaksanaan berbagai tindakan yang telah direncanakan sebelumnya tidak gagal. Sebagai bisnis atau kegiatan, administrasi berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan. Ada banyak tugas administrasi yang berada di bawah payung administrasi. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari membuat catatan hingga melakukan pembukuan sederhana hingga menyiapkan agenda. Administrasi digambarkan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara efisien dan efektif. Sebagai ilmuwan administrasi dan sebagai praktisi administrasi, kami selalu terlibat dalam proses konstruksi teori administrasi secara berkesinambungan.

Misalnya, Silalahi mengkaji administrasi dalam arti luas dalam bukunya *Studies on Administrative Sciences* (2016:7): “Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.”

Administrasi dalam kenyataannya bertingkat-tingkat, dimulai dari gambaran yang paling luas dan berlanjut ke gambaran yang paling sempit, apakah kita melihat fokus kajiannya dengan menuntut pemikiran ilmiah atukah kita melihatnya dari segi fokus kajiannya dengan mensyaratkan pemikiran ilmiah dan

pemikiran ilmiah. juga dalam pengertian lokus sebagai suatu kegiatan atau kegiatan yang hasilnya dapat memenuhi tuntutan hidup manusia.

Administrasi didefinisikan sebagai berikut oleh Silalahi dalam bukunya *The Study of Administrative Sciences* (2016:5):

“Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain”

Dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah pengumpulan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis untuk memudahkan dalam memperoleh data pada saat dibutuhkan di kemudian hari.

Untuk itu peneliti mengacu pada konsep administrasi **Siagian (2003:2)** yang tertuang dalam buku *Administrasi Pembangunan*, yang menjelaskan “administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. (1970:21) yang dikutip dalam buku buku Pasolong, n.d, (2019) yang berjudul “Teori Administrasi Publik”, mengemukakan bahwa sebagai berikut:

1. *(Public Administration) is Cooperative group effort in public setting.*
(Administrasi Publik) adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. *(Public Administration) covers all three branches: executive, legislative and judicial, and their interrelationships.* (Administrasi Publik) meliputi

ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislative dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.

3. *(Public Administration) has an important role formulating of public policy and is thus a part of the political process.* (Administrasi Publik) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
4. *(Public Administration) is cosely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community.* (Administrasi Publik) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. *(Public Administration) is different in significant ways from private administration.* (Administrasi Publik) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.
6. Menurut Rosenbloom (2005) yang dikutip dalam buku Pasolong, n.d, (2019) yang berjudul “Teori Administrasi Publik”, mengemukakan bahwa sebagai berikut:
7. “Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau bagian”

Berdasarkan uraian di atas bahwa administrasi publik berkaitan dengan pemerintahan yang mencakup eksekutif, yudikatif dan legislatif. Peneliti

berpendapat bahwa administrasi publik adalah sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif melalui penyelenggaraan pelayanan publik dan tercapainya tujuan negara.

Pada dasarnya administrasi mempunyai peranan yang sangat krusial dan penting dalam menyelenggarakan pencapaian tujuan dalam proses administrasi negara maupun administrasi publik mengenai tugas-tugas pemerintah maupun merumuskan suatu kebijakan dalam sebuah negara. Administrasi negara, administrasi publik maupun manajemen merupakan sistem yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

Hal ini untuk mencapai suatu proses tujuan administrasi yang telah ditentukan dengan melibatkan dua orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu sasaran, maka dalam lingkup administrasi tidak terlepas dalam sebuah wadah organisasi untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.1.2. Kajian Administrasi Publik

Kehadiran administrasi dalam suatu negara adalah suatu keharusan dan kebutuhan yang tak terbantahkan. Administrasi ini merupakan kumpulan norma, prosedur, dan keteraturan yang dirancang untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum. Dengan administrasi yang efektif, pemerintah dapat menyediakan berbagai layanan yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur dan keamanan. Namun, penting untuk diingat bahwa administrasi bukan hanya sekadar kumpulan peraturan; itu

juga merupakan representasi dari keseluruhan sistem yang diatur oleh pemerintah untuk mengelola dan menyelenggarakan layanan yang disponsori oleh negara.

Meskipun negara diorganisir untuk kepentingan rakyat, peran administrasi adalah menjembatani kepentingan masyarakat umum dengan pemerintah. Ini berarti bahwa sementara negara bertindak sebagai entitas yang mewakili kepentingan kolektif, administrasi berperan dalam menerjemahkan kebutuhan dan harapan masyarakat menjadi kebijakan dan layanan konkret. Dalam hal ini, penting bagi administrasi publik untuk beroperasi sesuai dengan standar moral dan etika, serta memperhatikan nilai-nilai agama yang berlaku dalam masyarakat.

Meskipun antara administrasi negara dan administrasi publik sama-sama berfokus pada pencapaian tujuan negara, namun terdapat perbedaan yang menjadi landasan dasar dalam basis penyelenggaraannya, yaitu di mana administrasi publik berorientasikan pada *public service*, sehingga kepentingan publik menjadi unsur yang paling diutamakan terutama di era transparansi pemerintahan saat ini. Administrasi publik memiliki ruang lingkup yang cukup luas di dalam ranah keilmuan, yaitu untuk mengatur mekanisme dan peranan negara dalam berkontribusi pada semua lini tata kelola pemerintahan. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad yang dikutip oleh Sellang (2016:48) dalam bukunya yang berjudul “Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya” ruang lingkup administrasi publik yaitu meliputi sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik
2. Birokrasi Pulik
3. Manajemen Publik

4. Kepemimpinan
5. Pelayanan Publik
6. Kinerja
7. Etika Administrasi

Sebagaimana menurut Hughes yang dikutip oleh Revida dkk, (2020 : 3) dalam bukunya yang berjudul “Teori Administrasi Publik” “administrasi publik merupakan aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayanan pulik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain.”

Selanjutnya, menurut Pasolog, yang dikutip oleh Revida dkk, (2020:3) dalam bukunya yang berjudul “Teori Administrasi Publik” “administrasi publik adalah bentuk Kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau Lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa administrasi publik adalah organisasi publik yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan aktivitas pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Dimana pegawai harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bobot tanggung jawab kinerja jabatan yang dimiliki. Administrasi publik merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan publik.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang disampaikan Chandler dan Plano yang dikutip oleh Sellang (2016:42) dalam bukunya yang berjudul “Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya” “proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,

mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan dalam kebijakan publik.”

Administrasi publik melibatkan partisipasi sumber daya anggota organisasi. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan bersamaan. Kebijakan yang diformulasikan melalui asas transparansi *stakeholder* terkait.

Seperti halnya yang disampaikan Dimock dan Koenig, yang dikutip oleh Mindarti (2016 : 4) dalam bukunya yang berjudul “Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik” “administrasi publik dapat di definisikan sebagai kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah.”

Pemahaman di atas memperlihatkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan inti dari pemerintah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Namun dalam realitasnya administrasi publik melibatkan seluruh anggota kelompok yang memiliki tanggung jawab beban kerja pada setiap jabatan di dalam instansi pemerintahan.

Pemahaman tersebut selaras berdasarkan definisi yang diberikan oleh Michael M. Harmon & Richard yang dikutip oleh Sellang (2016:42) dalam bukunya yang berjudul “Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya” “administrasi tidak mengacu pada secara eksklusif kepada orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan pemerintah.”

Administrasi publik secara garis besar adalah seluruh rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan persoalan publik, sehingga memiliki substansi pada

pemberian pelayanan kepada publik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dalam hal ini didominasi oleh instansi pemerintahan.

Administrasi publik menjadi unsur fundamental di dalam penyelenggaraan sistem birokrasi pemerintah. Dengan demikian administrasi harus mampu menjadi wadah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya. Hal ini didukung dengan pernyataan Gordon yang dikutip oleh Henry terjemahan Lontoh (1993:21) dalam bukunya “Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan”

Birokrasi pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan unsur-unsur efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sektor publik. Selain itu dituntut adanya keahlian administratif sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang efisien, atau dengan perkataan lain pejabat dalam administrasi pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebih profesional.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas mengarahkan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem birokrasi yang prima dalam mengelola sumber daya, baik itu infrastruktur maupun sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur pemerintahan harus ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimilikinya masing-masing.

Menurut Gordon yang dikutip oleh Henry terjemahan Lontoh (1993 : 6) dalam bukunya “Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan” “ciri dari administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.”

Pendapat tersebut secara eksplisit telah menyatakan bahwa di dalam proses administrasi publik, pola penyelenggaraan tata kelola birokrasi harus sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Sehingga setiap individu memiliki elektabilitas kinerja berdasarkan kewajiban beban kerja yang harus dipenuhi. Untuk mewujudkan birokrasi ideal sesuai dengan otoritas legal rasional, maka harus disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan administrasi publik yang sesuai dan relevan. Seperti yang dikemukakan oleh **Max Weber** yang dikutip oleh **Sellang (2016:50)** dalam bukunya yang berjudul “Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya” mengemukakan prinsip-prinsip fundamental dari otoritas legal-formal sistem birokrasi administrasi publik sebagai berikut :

1. Pengorganisasian fungsi jabatan yang berkelanjutan dan ditetapkan dengan peraturan
2. Bidang kompetensi khusus yang meliputi kewajiban, otoritas dan sarana paksaan
3. Susunan jabatan yang mengikuti prinsip hierarki
4. Peraturan dan norma teknis untuk pelaksanaan jabatan
5. Pemisahan hak pribadi dan milik organisasi
6. Tidak ada pemberian yang terkait dengan posisi jabatan
7. Tindakan, keputusan dan peraturan tertulis

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa sistem manajerial kinerja instansi pemerintahan menjadi esensi krusial di dalam proses administrasi publik. Selain itu administrasi publik juga melingkupi mekanisme kerja manajemen kepegawaian instansi pemerintahan serta manajemen kerja individu aparatur pada

instansi pemerintah. sistem manajemen administrasi publik terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan anomali publik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang prima sesuai dengan dinamika penyelenggaraan negara dan sistem layanan publik yang dibutuhkan. Layanan publik bukan hanya melingkupi kebutuhan masyarakat saja, tetapi juga para stakeholder pemberi layanan.

2.1.2. Midle Theory

2.1.2.1. Kajian Kebijakan

Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam tentang konsep kebijakan publik, penting untuk memahami konsep dasar dari kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini, kebijakan, atau yang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai policy, memiliki makna yang cukup luas. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merujuk pada rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau cara bertindak, terutama dalam konteks pemerintahan atau organisasi. Dengan kata lain, kebijakan merupakan panduan atau garis besar yang menetapkan tujuan, cita-cita, prinsip, dan pedoman yang akan diikuti dalam upaya mencapai sasaran tertentu.

Dalam implementasinya, kebijakan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat pemerintah, organisasi, maupun masyarakat umum. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dapat mencakup rencana untuk meningkatkan akses pendidikan, menetapkan standar kurikulum, atau menentukan alokasi anggaran untuk sekolah-sekolah. Begitu juga dalam konteks

organisasi, kebijakan manajemen mungkin berkaitan dengan aturan-aturan dalam pengelolaan sumber daya manusia, prosedur operasional, atau kebijakan keuangan.

Kebijakan merupakan instrumen penting dalam mengatur tindakan dan pengambilan keputusan di berbagai tingkat entitas sosial. Melalui kebijakan, sebuah pemerintah atau organisasi dapat merumuskan visi, tujuan, dan strategi untuk mencapai perubahan yang diinginkan atau menanggulangi masalah tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang konsep dan implementasi kebijakan sangatlah penting dalam konteks manajemen pemerintahan, organisasi, dan pembangunan sosial.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut **Budi Winarno (2007 : 15)**, istilah kebijakan (**policy term**) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip **Budi Winarno (2007: 17)** juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan

dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.2.2.Kajian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional

dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat menurut Teori George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan **Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181)** sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Selanjutnya tindakan implementasi kebijakan dapat pula dibedakan ke dalam "*Policy inputs and policy process*" (Dunn, 1994 : 338). *Policy inputs* berupa masukan sumber daya, sedangkan *policy process* bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (*outputs*) dan dampak (*impact*) kebijakan.

Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik)

dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatankegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

2.1.2.3. Kajian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah Bupati/provinsi, keputusan gubernur, peraturan Bupati kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah

publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu

biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.3. *Apply Theory*

2.1.3.1. Implementasi Kebijakan

George C. Edward III mengidentifikasi empat indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi:

Komunikasi yang efektif diperlukan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pentingnya komunikasi antara implementor (mereka yang melaksanakan kebijakan) dan sasaran kebijakan sangat menentukan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak tersebut, informasi dapat disampaikan dengan jelas, menciptakan konsistensi di antara para implementor dalam menjalankan setiap kebijakan di masyarakat. Komunikasi yang baik membantu memastikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan tujuan implementasinya.

2. Sumber Daya:

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia dianggap sebagai sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain itu, sumber daya finansial dan waktu juga diakui sebagai faktor penting. Pemanfaatan sumber daya dengan efisien dan efektif menjadi kunci dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

3. Disposisi:

Disposisi merujuk pada sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Faktor-faktor seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis menjadi bagian dari disposisi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, seperti kejujuran, komitmen tinggi, dan sifat demokratis, maka implementor akan mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan niat pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan sikap dan perspektif antara implementor dan pembuat kebijakan, implementasi kebijakan dapat menjadi tidak efektif.

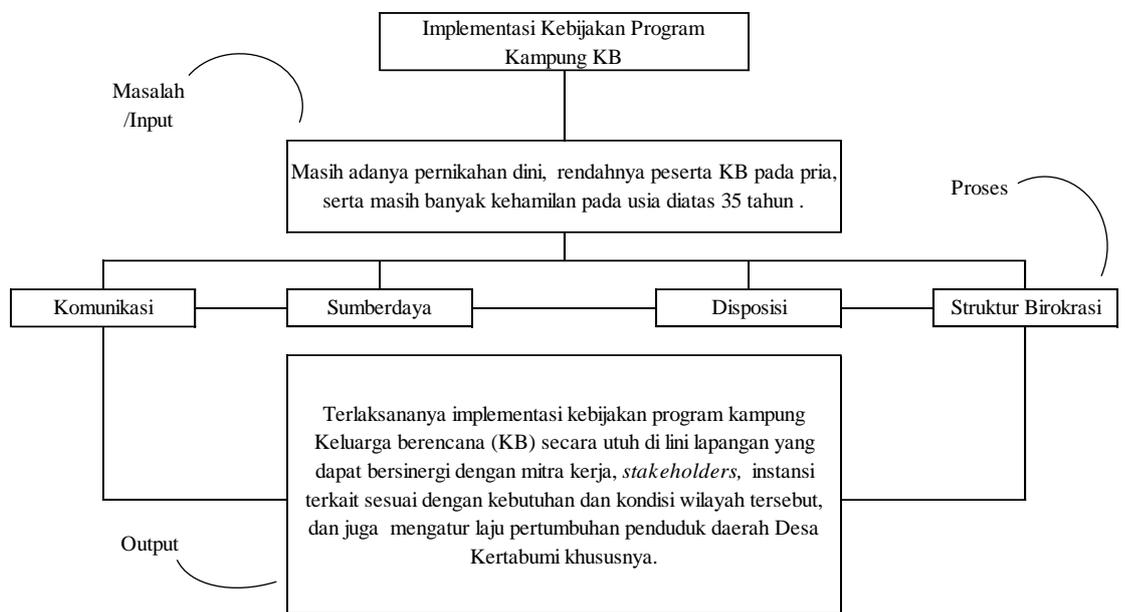
4. Struktur Birokrasi:

Struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP dibuat sebagai tanggapan terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana, dan dibuat agar dapat mencapai keseragaman dalam bekerja. Fragmentasi, di sisi lain, mengacu pada penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda. Hal ini memerlukan koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan lancar meskipun tanggung jawab tersebar di berbagai badan. Dengan memahami dan memperhatikan keempat indikator ini, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Dengan memahami dan mengapresiasi ketimpangan indikator ini, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh pengambil kebijakan.

2.2. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh Peneliti (2024)

2.3. Proposisi

Proposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rancangan usulan, ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, atau dibuktikan benar tidaknya. Proporsisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Pada umumnya proposisi dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua konsep (Rahardjo, 2021).

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan uraian konsep dan teori yang telat peneliti uraikan pada kerangka pemikiran maka peneliti merumuskan bahwa Implementasi Kebijakan program kampung KB pada Kampung Mawar desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, ditentukan oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.